

Millennium Development Goals (MDGs) dan Indonesia

15 Sep 2005

Dalam rangka mencapai target MDGs pada tahun 2015, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memenuhi tenggat waktu dengan melakukan penyusunan Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan (SNPK) dan mengintegrasikan upaya-upaya pencapaian MDGs dalam strategi pembangunan nasionalnya dalam pencapaian Tujuan 1 s.d. 7 yang disampaikan pada saat *High Level Plenary Meeting* (HLPM) bulan September 2005 di New York.

Terkait dengan pemantauan dan pencapaian Tujuan 1 s.d. 7 MDGs di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Buku Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Milenium Pada bulan Pebruari 2004. Buku tersebut dimaksudkan untuk menelaah dan mengukur kemajuan; mengenali tantangan; dan mengkaji program dan kebijakan untuk mencapai tujuan MDGs. Tujuan penerbitannya adalah untuk mendapatkan kesamaan pandang tentang posisi Indonesia dalam kaitan dengan sasaran MDGs, dan untuk menetapkan target yang harus diagendakan.

Sehubungan dengan Tujuan ke-8, Indonesia akan terus mengintensifkan upaya-upaya penguatan *governance*, pemberantasan korupsi dan perbaikan iklim investasi dan terus mengupayakan pembentukan kemitraan antara negara maju dan negara berkembang dalam pencapaian MDGs melalui pendekatan bilateral, regional maupun multilateral.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam rangka pencapaian MDGs

Dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia berpandangan bahwa sistem perdagangan keuangan dan bantuan internasional harus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Indonesia memberikan penekanan khusus dalam pencapaian Tujuan ke-8 MDGs, yaitu mewujudkan kemitraan global bagi pembangunan. Bagi Indonesia, kemitraan global harus didasari oleh kerjasama yang tulus (*genuine partnership and cooperation*) antara negara-negara maju dan berkembang, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat madani. Indonesia berharap bahwa negara-negara maju, organisasi donor dan organisasi internasional lainnya dapat melakukan *scaling up* dalam mendorong lebih lanjut kemitraan global dan kerjasama global untuk membantu pencapaian MDGs di tingkat global.

Indonesia mendukung prinsip *common but differentiated responsibility* dalam mencapai sasaran pembangunan dan upaya penghapusan kemiskinan. Negara-negara maju harus memenuhi porsi tanggung jawabnya secara konkrit dan dengan kerangka waktu (*timeframe*) yang jelas. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas bantuan pembangunan, sistem perdagangan internasional yang adil dan berorientasi pembangunan, serta pengurangan beban hutang negara-negara berkembang secara berarti.

Arsitektur Sistem Keuangan dan Perdagangan Internasional

Sehubungan dengan arsitektur sistem keuangan dan perdagangan internasional, Indonesia menetapkan komitmennya untuk berperan aktif dalam mendorong (i) sistem keuangan dan perdagangan internasional yang menjamin aspek kesetaraan dan kepentingan bersama, meningkatkan keefektifan, akuntabilitas

dan transparansi lembaga-lembaga *Bretton Woods* dan *World Trade Organization* (WTO) dan peningkatan representasi negara berkembang yang lebih proporsional dalam proses pengambilan keputusan, (ii) masyarakat internasional untuk secara bersama merevitalisasi peran PBB di bidang keuangan, moneter dan perdagangan internasional, yang diarahkan guna memfasilitasi mobilisasi dana bagi pembangunan negara-negara berkembang dan (ii) peningkatan koherensi dan koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan antara PBB dengan lembaga-lembaga *Bretton Woods* dan WTO untuk mencapai sasaran MDGs, yang antara lain dapat dilakukan melalui pelaksanaan *Monterrey Consensus* dan *Johannesburg Plan of Implementation* secara penuh.

Official Development Assistance

Peningkatan penyaluran *Official Development Assistance* (ODA) perlu dibarengi dengan peningkatan kemampuan negara penerima berlandaskan arahan/panduan kebutuhan dan kepemimpinannya (*demand driven*) dalam mewujudkan *aid effectiveness* dan *donor harmonization* serta penyalurannya tepat guna dan efisien sesuai kebutuhan penduduk miskin di negara penerima. Bantuan internasional harus mencakup pula upaya-upaya untuk meningkatkan *capacity building* untuk pengelolaan ODA negara-negara penerima. Peningkatan peran ODA bagi pembangunan perlu diikuti dengan memobilisasi sumber dana melalui peningkatan investasi asing (*Foreign Direct Investment/FDI*), pengembangan sistem perdagangan yang terbuka dan seimbang dengan memberikan akses pasar yang lebih luas kepada produk ekspor negara berkembang.

Debt Sustainability dan Debt for MDGs Swap

Masyarakat internasional harus meningkatkan upayanya untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian hutang negara-negara berkembang berpenghasilan menengah melalu suatu kerangka yang komprehensif. Indonesia mendukung perubahan pendekatan dalam definisi *debt sustainability*, yaitu penggunaan dana untuk mencapai target MDGs menjadi prioritas sebelum pembayaran hutang kepada lembaga-lembaga donor multilateral dan bilateral. Namun kebijakan tersebut tidak mengurangi dana bantuan pembangunan yang dialokasikan kepada negara berkembang lainnya. Dalam kaitan ini, Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah pembayaran hutang secara konsisten sesuai dengan jadwal dan pengaturan yang ditentukan, dalam konteks pelaksanaan mekanisme dan strategi pengelolaan *debt sustainability*.

Salah satu kemitraan dan kerjasama yang diusulkan Indonesia adalah *debt for MDGs swap* untuk dapat diterima secara luas. Konsep ini akan lebih efektif dan sehat dalam mencari jalan keluar bagi permasalahan hutang luar negeri negara berkembang. Indonesia misalnya dapat memanfaatkan dana yang semula dialokasikan untuk membayar hutang, untuk dipakai membiayai program-program yang berkaitan dengan pencapaian MDGs.

Trade for Development

Dalam bidang perdagangan yang berhubungan dengan pencapaian MDGs, Indonesia berpedoman pada aspek "*Trade for Development*", yaitu: (i) kebijakan perdagangan yang bersifat *broad based*, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan tiap sektor dalam negara, dan menyelarakannya dengan kebijakan-kebijakan di sektor lain, (ii) kebijakan perdagangan tidak hanya terpatok pada kebijakan ekonomi, tapi juga memasukkan azas-azas keadilan,

sustainable development, rural development, farmers livelihood dan *food security*.

Indonesia berkepentingan bagi kesuksesan KTM ke-6 WTO di Hong Kong (Desember 2005) agar dimensi pembangunan dari Deklarasi Doha dapat terwujud yaitu provisi *special and differential treatment* menjadi bagian yang integral dari setiap proses negosiasi. Indonesia mengharapkan agar negara maju memainkan peranan yang konstruktif dalam pencapaian mandat. Negara maju diharapkan untuk bersungguh-sungguh menunjukkan komitmennya dalam merealisasikan Putaran Pembangunan Doha.

Kerjasama juga harus mencakup upaya konkrit peningkatan alih teknologi serta pengembangan kapasitas produktif dan perdagangan negara-negara berkembang. Indonesia mendukung pelaksanaan inisiatif "*quick win*" yang disampaikan Sekretaris Jenderal PBB melalui *Millennium Project* berdasarkan karakteristik masing-masing negara dalam rangka upaya percepatan pencapaian sasaran MDGs.